

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penelitian ini berangkat dari adanya keresahan dari peneliti sendiri dengan adanya perubahan nilai-nilai positif dalam lingkungan pendidikan, sebagai contoh banyak terjadinya kekerasan oleh guru terhadap siswa, pelecehan seksual oleh guru terhadap siswa, tawuran antar pelajar bahkan mahasiswa, narkoba dan seks bebas dikalangan pelajar dan mahasiswa serta berbagai kenakalan dan perilaku menyimpang dari para generasi muda bangsa kita. Berdasarkan penelitian dari Muis (2013) menyimpulkan bahwa jumlah populasi sebanyak 2.458 dan 304 sampel terhadap mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 90% berpegangan tangan, 82% berpelukan, 77% berciuman, 65% meraba bagian tubuh yang sensitif, 33% petting, 30% oral seks, 27% pernah hubungan seksual dan 40% pernah mengalami kekerasan seksual. Lokasi untuk memadu kasih yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tempat hiburan 34%, 33% kos/kontrakan, 32% lingkungan kampus, 2% rumah dan 1% memilih tempat lain (danau dan tempat wisata).

Sementara itu menurut penelitian Indra Wirdhana ketua BkbbN, mengemukakan bahwa kasus aborsi dikalangan remaja, diperoleh data 2,5 juta jiwa perempuan pernah melakukan aborsi dan dari jumlah ini 27 persen atau 700 ribu dilakukan oleh remaja. Untuk Narkoba menunjukkan 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia atau 3,2 juta jiwa pengguna narkoba dan dari jumlah itu 78% dari kalangan remaja. Sedang kasus AIDS hingga Desember 2009 sebesar 19.973 kasus dan dari jumlah ini 50,3% ditularkan melalui hubungan heteroseksual (<http://health.liputan6.com>).

Perkelahian termasuk jenis kenakalan remaja akibat kompleksnya kehidupan kota yang disebabkan karena masalah sepele. Tawuran pelajar sekolah menjadi potret buram dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada 2010, setidaknya terjadi 128 kasus tawuran antar pelajar. Angka itu melonjak tajam lebih dari 100 persen pada 2011,

yakni 330 kasus tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Pada Januari-Juni 2012, telah terjadi 139 tawuran yang menewaskan 12 pelajar. Fenomena kasus seks di luar nikah di Indonesia menurut Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH mengalami peningkatan walaupun peningkatannya sedikit namun jumlahnya terbilang banyak yaitu sebanyak 14,6 persen pada pria dan 4,5 persen pada perempuan (<http://beritasore.com>).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia (Eleanora, 2011).

Melihat kondisi dari data yang telah dijabarkan di atas, tentunya membuat kita menjadi miris karena beberapa perilaku menyimpang justru dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa yang pada dasarnya mereka adalah generasi muda bangsa Indonesia. Bagaimana negara bisa maju, apabila generasi mudanya melakukan perilaku yang menyimpang. Berdasarkan uraian fakta sosial di atas yang merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan sangatlah penting untuk melakukan pembinaan warga negara, menurut perspektif kewarganegaraan kompetensi warga negara (*civic competence*) terbagi menjadi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Fakta sosial yang telah dikemukakan di atas, tentunya harus segera dicarikan solusi karena masalah itu dianggap genting berkenaan dengan generasi muda bangsa Indonesia yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan bangsa. Akan menimbulkan pengaruh yang negatif apabila permasalahan generasi muda yang melakukan perilaku menyimpang terus dibiarkan. Bahkan lebih buruk ke depan bisa

terjadi tujuh dosa yang mematikan, menurut Mahatma Ghandi dalam Soedarsono (2010) mengemukakan tujuh dosa yang mematikan yaitu: (1) semakin merebaknya nilai-nilai dan perilaku memperoleh kekayaan tanpa bekerja, (2) kesenangan tanpa hati nurani, (3) pengetahuan tanpa karakter, (4) bisnis tanpa moralitas, (5) ilmu pengetahuan tanpa kemauan, (6) agama tanpa pengorbanan, (7) politik tanpa prinsip.

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena melalui pendidikan manusia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Indonesia dalam konteks pendidikan, telah menyelenggarakan dengan berbagai usaha agar warga negara memperoleh pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU RI No 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk kemajuan bangsa, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV yang menegaskan salah satu tugas negara “. . . . . mencerdaskan kehidupan bangsa . . . . .”, kemudian Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Selanjutnya Pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945, menyebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat diketahui bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, karena hak tersebut dijamin oleh pemerintah melalui UUD NRI 1945. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mengena kepada setiap warga negara perlu di usahakan oleh pemerintah. Untuk menjamin pendidikan nasional di Indonesia pemerintah mengundang UU RI No 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional, yang kemudian disempurnakan dengan

diundangkannya UU RI No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” (Dariyo, 2013: 43).

Pendidikan nasional ialah pendidikan yang diselenggarakan dalam skala nasional, sehingga pendidikan tersebut berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman (UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 1, ayat 2-3 tentang sistem pendidikan nasional). Sehingga dapat diketahui orientasi pendidikan di Indonesia selain membentuk pengetahuan peserta didik, juga ditanamkan jiwa Pancasila, patuh dan taat terhadap hukum, religius, bangga terhadap budaya bangsa dan bersikap terbuka pada perubahan zaman.

Terdapat beberapa satuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal ialah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Dariyo, 2013: 44). Berdasarkan kutipan di atas, maka perlu untuk diketahui yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dalam jenjang pendidikan tinggi.

Permasalahan yang sekarang dihadapi oleh pendidikan adalah pembelajaran yang diharapkan mampu memberikan dampak instruksional dan dampak pengiring bagi siswa serta mahasiswa ternyata lebih pada penekanan dampak instruksional saja, atau dalam artian hanya kognitif dan pengetahuan yang diperhatikan. Sedangkan dampak pengiring kurang mendapat perhatian, sehingga siswa dan mahasiswa hanya aspek kognitif saja yang dilatih, untuk aspek lain seperti psikomotor dan afektif dapat dikatakan terabaikan. Hal tersebut berdampak tidak adanya pengalaman belajar yang bermakna. Hal tersebut sejalan dengan Staf Ahli Mendiknas (2007) dalam Winarno (2013: 52-53) yang menyebutkan bahwa pada umumnya kegiatan pembelajaran masih bersifat konvensional atau masih berpusat pada guru (*teacher centered*),

kurang mendorong siswa mengembangkan potensi, dan cenderung lebih menekankan pada penyampaian materi.

Selain itu aspek moral sangat berkaitan dengan kemajuan bangsa seperti yang diungkapkan oleh Lickona dalam Megawangi (2004: 7-8) ada sepuluh tanda-tanda jaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayakan ketidakjujuran, (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara membina dimensi-dimensi kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) mahasiswa agar memiliki karakter yang kuat. Pembinaan *civic competence* dapat dilakukan melalui pendidikan dengan proses pembelajaran yang bermakna dengan adanya Pendidikan Kepramukaan sebagai mata kuliah wajib di Prodi PPKn FKIP UMS. Pendidikan Kepramukaan merupakan perubahan dari mata kuliah Pendidikan Generasi Muda, perubahan tersebut dilakukan pada kurikulum tahun 2007, dengan bobot sks di semester 1 sejumlah 2 sks dan di semester II sejumlah 2 sks. Posisi mata kuliah Pendidikan Kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS sebagai MPB yaitu Mata Kuliah Perilaku Berkarya merupakan kelompok mata kuliah mengenai perilaku berkarya. Kelompok mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki daya cipta sehingga mampu berkarya di bidang Pendidikan Pancasila, PKn, dan membina Pramuka. Sehingga mahasiswa akan mempunyai kompetensi mampu membina kegiatan Pramuka di sekolah sebagai salah satu wahana pembinaan karakter siswa dan generasi muda.

Upaya ini untuk membina agar mahasiswa tidak mengikuti perilaku menyimpang dalam kehidupan sehari-harinya. Perkuliahan melalui mata kuliah Pendidikan Kepramukaan diharapkan dapat mengembangkan *civic competence* mahasiswa, karena perkuliahan tidak hanya di kelas dengan berbagai materi, namun juga praktek dalam sekolah dan masyarakat serta dilatih untuk bersikap demokratis, sadar hukum, tanggung jawab dan terampil, berpikir kritis, pemecahan masalah dan kerjasama.

Pramuka di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan sudah diatur dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 (UU RI No 12/2010) tentang Gerakan Pramuka. Dalam undang-undang tersebut tersurat bahwa gerakan pramuka berasaskan Pancasila, sehingga semua aktifitas berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Gerakan Pramuka sendiri sebagai organisasi mempunyai tujuan seperti yang diatur dalam pasal 4 UU RI No 12/2010 tentang Gerakan Pramuka sebagai berikut.

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Dapat diketahui bahwa gerakan pramuka memiliki tujuan yang searah dengan tujuan pendidikan nasional, dimana sebagian besar mengarah kepada pembinaan dan pengembangan karakter siswa. Untuk membelajarkan semua itu diperlukan proses pendidikan dan pembinaan, dalam UU RI No 12/2010 dikenal dengan Pendidikan Kepramukaan, “Pendidikan Kepramukaan sebagai proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan” (UU RI No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka). Sehingga dapat diketahui gerakan pramuka adalah organisasinya, sedangkan pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan, pembinaan untuk anggota pramuka. “Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang

dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif” (UU RI No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka).

Menurut Budimansyah (2010: 91) terdapat karakter yang dapat diperoleh dari kegiatan Pramuka seperti yang digambarkan di bawah ini.

**Tabel 1.1 Karakter dalam kegiatan Pramuka**

| No | Kegiatan                             | Karakter yang dikembangkan   |   |
|----|--------------------------------------|--|---|
|    |                                      | Warga negara demokratis  | Sadar Hukum   |
| 1. | Mempelajari sejarah kepanduan        | Menonjolkan nalar dan akal sehat   | Kesadaran untuk menaati kaidah hidup                              |
| 2. | Perkemahan                           | Kerjasama dan mengutamakan kepentingan bersama                                       | Patuh pada aturan setempat, termasuk kebiasaan-kebiasaan setempat |
| 3. | Perlombaan                           | Semangat berkompetisi yang sehat   | Menaati aturan main, sikap ksatria, dan sportif                   |
| 4. | Mempelajari tertib berlalu-lintas    | Menjaga keselamatan diri dan orang lain  | Santun berlalu lintas dan berkendara di jalan raya                |
| 5. | Penjelajahan dan hidup di alam bebas | Meningkatkan kemandirian sekaligus merapatkan persatuan, kesatuan, dan kerjasama tim | Membina kedisiplinan pribadi dan kelompok                         |
| 6. | Hiking                               | Meningkatkan solidaritas dan   | Taat asas, disiplin, dan mampu mengendalikan                      |

|    |                      |   |  |
|----|----------------------|---|--|
|    |                      | kebersamaan   | diri   |
| 7. | Pemilihan pratama    | Melakukan musyawarah untuk mufakat, semangat kekeluargaan | Secara moral bertanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah |
| 8. | Latihan kepemimpinan | Mengasah kemampuan manajerial                             | Menanamkan kejujuran dan tanggung jawab                      |

Terkait dengan warga negara yang demokratis, dapat kita ambil penelitian dari David Kerr (1999) dalam Budimansyah (2010: 51-55), pendidikan demokrasi dalam konteks PKn di negara Asia termasuk di Indonesia masih bersifat kurus (*thin citizenship education*) yang program PKn nya hanya melakukan pembelajaran tentang demokrasi. Sedangkan di negara maju, seperti Amerika Serikat, New Zealand, dan beberapa negara maju di Eropa Utara sudah bersifat gemuk (*thick citizenship education*) yang melakukan pembelajaran hidup berdemokrasi untuk menyokong kehidupan yang demokratis. Posisi yang berada di program Pendidikan Kewarganegaraan yang kurus dengan gemuk dinamakan program Pendidikan Kewarganegaraan Moderat (*moderate citizenship education*).

Upaya untuk membina *civic competence* mahasiswa sebagai generasi muda, dipandang cocok melalui mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Ginanjar (2014), menyimpulkan kegiatan Pramuka yang dilaksanakan di MI Cisarua telah memberikan kontribusi terhadap pembinaan karakter siswa, membentuk sikap dan kepribadian generasi muda sehingga berkiprah dalam ketahanan bangsa dan negara melalui kegiatan yang menumbuhkan patriotisme serta hubungan sosial yang baik dalam masyarakat. Perlu menjadi bahan pertimbangan sebagai penguatan karakter dengan membina *civic competence* mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, dan menjadi bahan pertimbangan juga untuk perguruan tinggi memasukkan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan agar calon guru PPKn memiliki *civic competence* dan karakter yang kuat serta mendukung terealisasi tujuan

pendidikan nasional. Oleh karena itu diperlukan pembinaan *civic competence* mahasiswa PPKn yang nantinya akan menjadi guru dan pembina Pramuka di persekolahan mampu menguatkan karakter siswa, mengingat dalam kurikulum 2013, ekstrakurikuler Kepramukaan wajib diikuti sehingga ke depan dibutuhkan pembina Pramuka yang handal, terampil, dan berkarakter kuat.

Menurut Reza (2014) pelaksanaan kegiatan kepramukaan bertujuan untuk membekali anggota pramuka dengan keterampilan, pengetahuan dan ilmu yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain itu metode yang menyenangkan, menantang sekaligus *learning by doing* digunakan dalam setiap kegiatan kepramukaan. Pembekalan keterampilan, pengetahuan dan ilmu mengacu pada Syarat Kecakapan Umum (SKU) yang ditetapkan oleh Kwarnas. Penanaman karakter melalui kegiatan kepramukaan termasuk kategori baik (82,81%) terhadap penilaian dari anggota pramuka. Penilaian dari teman sekelas termasuk kategori sangat baik (88,03%), didukung dengan terdapatnya perbedaan yang signifikan (6,336) terhadap tingkat pelanggaran antara siswa dan anggota pramuka. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan berjalan dengan sangat baik dan melalui kegiatan kepramukaan karakter anggota pramuka menjadi lebih baik.

Melalui kegiatan Kepramukaan inilah tentunya dapat bekerjasama antara PKN dengan Kepramukaan untuk menjadikan mahasiswa menjadi warga negara yang demokratis. Karena menurut penelitian David Kerr PKN di Asia termasuk Indonesia hanya membelajarkan tentang demokrasi, maka dari itu perlu dukungan dari kegiatan-kegiatan semacam Kepramukaan, agar PKN di Indonesia bisa bergeser ke pendulum moderate bahkan bisa ke pendulum gemuk menyusul negara-negara yang sudah maju. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS merupakan salah satu program studi yang memasukkan Pendidikan Kepramukaan sebagai mata kuliah wajib di semester satu dan dua. Program studi PPKn FKIP UMS memiliki visi menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Ketatanegaraan, untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani. Sedangkan misinya sebagai berikut:

Beny Dwi Lukitoaji, 2015

**PEMBINAAN CIVIC COMPETENCE MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN SEBAGAI Penguatan Karakter Generasi Muda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Ketatanegaraan.
- b. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui program pendidikan kepramukaan.

Hal tersebut menjadi suatu yang menarik juga untuk dikaji dan diteliti, karena mata kuliah Pramuka hadir sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Kehadiran mata kuliah Pramuka di perguruan tinggi khususnya di prodi PPKn akan membangkitkan kembali semangat kependuan di Indonesia. Karena masih langka adanya mata kuliah Pramuka di perguruan tinggi, setelah adanya penelitian ini diharapkan ada perguruan tinggi lain yang akan memasukkan Pramuka sebagai mata kuliah di kurikulumnya, sehingga akan memperkuat lulusan dengan karakter dan kompetensi kewarganegaraan yang cerdas dan baik.

Pendidikan Kepramukaan dalam PKn dijadikan wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan *hands-on experience*. Dari kegiatan tersebut diharapkan ada kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku berkarakter (Budimansyah, 2010: 90). Sehingga diketahui bahwa Kepramukaan dan PKn mempunyai keterkaitan sebagai laboratorium agar mahasiswa dapat praktek dan mendapat pengalaman dari Kepramukaan.

Dengan demikian diharapkan akan terjadinya pendidikan karakter yang memang ke depan dibutuhkan untuk memfilter budaya asing yang masuk. Seperti diketahui pembentukan karakter tidak semudah membalikkan tangan, namun membutuhkan proses yang panjang, seperti yang diungkapkan Branson (1998), bahwa:

*Character, however, does not come pre-packaged. Character formation is a lengthy and complex process. And, as James Q. Wilson (Wilson, 1995), a life-long student of character, reminds us; "We do not know how character is formed in any scientifically rigorous sense." But there is an abundance of anecdotal data and research on which to draw. Those observations and that research tell us that the study of traditional school subjects such as*

*government, civics, history and literature, when properly taught, provide the necessary conceptual framework for character education (Branson, 1998).*

(Karakter, bagaimanapun, tidak datang dengan sendiri. Pembentukan karakter adalah proses panjang dan rumit. Dan, seperti James Q. Wilson (Wilson, 1995), seorang mahasiswa yang selalu hidup berkarakter, mengingatkan kita; "Kami tidak tahu bagaimana karakter terbentuk dalam arti secara ilmiah". Tapi ada banyak data dan penelitian yang menarik. Pengamatan dan penelitian yang mengatakan bahwa studi mata pelajaran tradisional seperti pemerintah, kewarganegaraan, sejarah dan sastra, bila diajarkan dengan baik, memberikan kerangka kerja konseptual yang diperlukan untuk pendidikan karakter).

*Primary responsibility for the cultivation of ethical behavior and the development of private character, including moral character, lies with families, religious institutions, work settings, and the other parts of civil society. Schools, however, can and should play a major role in the overall development of the character of students. Effective civic education programs should provide students with many opportunities for the development of desirable traits of public and private character. Learning activities such as the following tend to promote character traits needed to participate effectively (Branson, 1998).*

(Tanggung jawab utama untuk budidaya perilaku etis dan pengembangan karakter pribadi, termasuk karakter moral, terletak pada keluarga, lembaga keagamaan, pengaturan kerja, dan bagian lain dari masyarakat sipil. Sekolah, bagaimanapun, dapat dan harus memainkan peran utama dalam pengembangan keseluruhan karakter siswa. Program Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif harus memberikan para siswa banyak kesempatan untuk pengembangan sifat yang diinginkan karakter publik dan privat. Kegiatan belajar seperti berikut cenderung untuk mengembangkan karakter yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif).

Senada dengan kutipan di atas, Megawangi (2004: 1) mengemukakan bahwa sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Banyak pakar, filsuf, dan orang-orang bijak yang mengatakan bahwa faktor moral adalah hal yang utama harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Salah satu kewajiban utama yang harus dijalankan oleh para orang tua dan pendidik adalah melestarikan dan mengajarkan

nilai-nilai moral kepada anak-anak kita. Nilai-nilai moral yang ditanamkan akan membentuk karakter yang merupakan fondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis dengan judul “Pembinaan *Civic Competence* Mahasiswa Melalui Pendidikan Kepramukaan Sebagai Penguatan Karakter Generasi Muda (Studi Kasus pada Program Studi PPKn di UMS)”.

## 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi, kompetensi dan karakter dari mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas.
- b. Pendidikan Kepramukaan hadir di perguruan tinggi sebagai upaya untuk penguatan karakter generasi muda dengan berbagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai positif dan bermakna.
- c. Generasi muda sebagai *agent of change* harus dipersiapkan dan dibina dalam rangka memperkuat karakter dan kompetensi kewarganegaraan.
- d. Pembelajaran harus menekankan pada tiga aspek yaitu kognitif, psikomotorik, afektif, sehingga tujuan pembelajaran instruksional dan pengiring dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok penelitian yakni “Bagaimana pembinaan *civic competence* mahasiswa melalui Pendidikan Kepramukaan sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS?”. Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka peneliti menjabarkan kembali rumusan permasalahan menjadi beberapa sub rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *Civic Competence* dalam konteks Pendidikan Kepramukaan sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS?

- b. Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Kepramukaan dalam membina *Civic Competence* mahasiswa sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS?
- c. Bagaimana kendala dan solusi dalam pembinaan *Civic Competence* mahasiswa melalui Pendidikan Kepramukaan sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS?
- d. Bagaimana hasil Pendidikan Kepramukaan dalam membina *Civic Competence* mahasiswa sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui pembinaan *civic competence* mahasiswa melalui Pendidikan Kepramukaan sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan:

- a. *Civic Competence* dalam konteks Pendidikan Kepramukaan sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS.
- b. Proses pembelajaran Pendidikan Kepramukaan dalam membina *Civic Competence* mahasiswa sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS.
- c. Kendala dan solusi dalam pembinaan *Civic Competence* mahasiswa melalui Pendidikan Kepramukaan sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS.
- d. Hasil Pendidikan Kepramukaan dalam membina *Civic Competence* mahasiswa sebagai penguatan karakter generasi muda di Prodi PPKn FKIP UMS.

### 1.4 Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Bagi peneliti dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang pembinaan *civic competence* di perguruan tinggi.

- b. Para civitas akademika sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan pelaksanaan Kepramukaan sebagai laboratorium PKn sehingga terwujud dampak pengiring.

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Mengetahui pembinaan *civic competence* mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kepramukaan.
- b. Mendorong para dosen dan pimpinan prodi untuk memperhatikan dampak pengiring dari setiap mata kuliah.
- c. Mendukung hasil penelitian yang sebelumnya sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu yang dikaji khususnya terkait PKn.

### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini terdiri dari lima bab yang tersusun dari bab I sampai bab V, antara lain bab I mengenai pendahuluan, bab II mengenai tinjauan pustaka, bab III mengenai metode penelitian, bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dan bab V mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bab I mengenai pendahuluan. Pada bagian bab ini secara rinci dikaji mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II mengenai kajian pustaka. Pada bagian bab ini secara rinci dikaji mengenai kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang dijadikan pisau analisis pada bagian pembahasan, teori tersebut antara lain: (1) kajian tentang *civic competence*, (2) kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), (3) kajian tentang Pendidikan Kepramukaan, (4) kajian tentang Pendidikan Karakter.

Bab III mengenai metode penelitian. Pada bagian bab ini secara rinci akan dikaji mencakup lokasi dan partisipan penelitian, pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data.

Bab IV mengenai hasil temuan dan pembahasan penelitian. Pada bab ini akan dikaji secara rinci dan mendalam tentang profil lokasi tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V mengenai simpulan, implikasi dan saran. Pada bab ini dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) simpulan (2) implikasi dan (3) saran.